

**ANALISIS TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH PRINGGODANI DEMAK**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)**

Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)



**Disusun oleh:
AHSANI TAQWIIM
122311020**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. Ahsani Taqwiim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Ahsani Taqwiim
NIM : 122311020
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Tolkah, MA.

NIP. 19690507199603100

Semarang, 26 Mei 2017

pembimbing II

Brilivan Ernawati, SH, MHum.

NIP. 196312191999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahsani Taqwiim
NIM : 122211020
Jurusan : Muamalah (MU)
Judul : Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi
Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlode/ baik/ cukup, pada tanggal:

16/ Juni /2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Islam.

Semarang 16 Juni 2017

Ketua Sidang

Maria Anna Murvani, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

Sekretaris Sidang

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196908071996031005

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001



Penguji II

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 19620601 199303 2001

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

1. Untuk Afdloli S.Sos dan Suparinten SE, selaku kedua orang tua yang penulis cintai dan Ahsanul Ibaad sebagai adik penulis, yang tiada henti-hentinya mendoakan, mendukung baik moral dan materill. Dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat.
2. Untuk nenek penulis (alm) Paelah yang telah memberikan tempat tinggal sementara dikala penulis melaksanakan pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
3. Sahabat-Sahabat MUA dan MUB angkatan 2012 yang telah memberi warna hidup penulis dalam mengarungi perjalanan pendidikan di UIN Walisongo Semarang .
4. Teman-teman KKN ke 66 Posko 64 Desa Giling, Kecamatan GunungWungkal, Pati .
5. Almamater UIN Walisongo Semarang.
6. Pembaca yang budiman.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAK

Musyarakah adalah konsep kerjasama dalam usaha perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah dalam hal ini menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian di tanggung secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* sehingga praktik pembiayaan yang dilaksanakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah*. Namun dalam pelaksanaannya keuntungan ditetapkan di awal akad, berupa nominal tetap bukan keuntungan nyata dan penentuannya dilakukan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, begitu pula kerugian dibebankan pada anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana jenis akad *musyarakah* yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak. (2) Bagaimana penerapan akad pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memperoleh informasi terhadap suatu masalah-masalah yang dibahas yang diperoleh secara langsung dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif bersifat kualitatif, yang digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap akad pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani.

Berdasarkan data sekunder dan data primer yang peneliti peroleh maka peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi dari pembiayaan *musyarakah* yang berdasarkan prinsip syariah tersebut

terdapat beberapa hal yang belum sesuai pada Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* salah satunya mengenai bagi hasil (keuntungan) yang ditentukan di awal akad berupa nominal, sehingga menyebabkan potensi riba, kerugian ditanggung salah satu pihak anggota yang menyebabkan tidak setara kedudukan kedua pihak, serta disertai jaminan. Dengan demikian pembiayaan akad musyarakah masih belum sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Lembaga dalam hal ini belum menjalankan prinsip syariah dengan baik dan benar.

Kata Kunci: Musyarakah, Bagi Hasil, Fatwa DSN MUI.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak” dapat selesai dengan baik dan lancar.

Dalam proses penyusunannya, skripsi ini melibatkan kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu berkaitan dengan hal tersebut dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak tersebut khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum, selaku Kajur Muamalah yang telah memberi izin dalam pengajuan judul.
4. H.Tolkah, MA, selaku pembimbing 1 yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Briliyan Ernawati, SH.,MHum. selaku pembimbing 2 yang telah mengorbankan waktu untuk mengoreksi tulisan dan materi yang ada dalam skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Noor Muharor, SE., selaku Direktur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak yang telah memberikan izin penelitian sehingga penelitian berjalan lancar.
8. Kedua orang tua penulis (Afdloli S.Sos, dan Suparinten SE.), serta adik penulis (Ahsanul Ibaad) yang senantiasa memberikan doa restu kepada penulis selama studi dan dalam penulisan skripsi, serta selalu memberikan motivasi maupun dukungan moral dan materil.
9. (Alm.) Paelah, selaku nenek penulis yang telah memberikan tempat singgah selama studi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 26 Mei 2017

Penulis

Ahsani Taqwiim

NIM: 12231102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II KONSEP TINJAUAN UMUM MUSYARAKAH

A. Pengertian Musyarakah	21
B. Dasar Hukum Musyarakah	23
C. Rukun dan Syarat Musyarakah.....	27

D.	Macam-Macam Musyarakah	37
E.	Pembagian Proporsi Keuntungan	44
F.	Manfaat Musyarakah	47
G.	Hal-Hal yang Membatalkan Musyarakah	49
H.	Berakhirnya Musyarakah.....	51

BAB III SISTEM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH PRINGGODANI DEMAK

A.	Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak	53
1.	Latar Belakang Pendirian	53
2.	Tujuan, Visi, Misi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani	57
3.	Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani	62
B.	Jenis dan Layanan Produk di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani	63
C.	Praktek Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani	67
D.	Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani	73
E.	Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani	74

F.	Problematika Sistem Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani	76
----	---	----

BAB IV ANALIS TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH PRINGGODANI DEMAK

A.	Analisis Terhadap Jenis Akad Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak	77
B.	Analisis Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani	65

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	98
B.	Saran-Saran.....	100
C.	Penutup.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar, tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* (menabung). Sehingga lembaga keuangan memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.¹

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu aplikasinya

¹ Jamal Lulain Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009) hlm 51.

adalah menerapkan pelayanan (*service*) yang berbasis moral dan spiritual.

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Hanya saja perbedaan terletak pada sistem dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang lebih mudah diterapkan secara *integral*.² Dalam kenyataannya, masyarakat menganggap bahwa menerima atau membayar bunga termasuk riba. Sementara riba dalam Islam dilarang, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan* (Ali Imran: 130)

Lembaga keuangan syariah muncul sebagai salah satu solusi alternatif dalam rangka melestarikan syariat Islam yang didalamnya terkandung suatu konsep *hifdz al-maal* yang

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003) hlm 8.

merupakan prinsip ajaran Islam. Disamping itu munculnya lembaga keuangan syariah tersebut sebagai suatu solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan bunga bank dan riba.³

Selain bank syariah masih terdapat lembaga keuangan bukan bank yang melaksanakan konsep syariah dalam menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau sering disebut Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

Koperasi Syariah adalah usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat dibedakan menjadi:

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil.
2. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usaha bergerak dibidang pembiayaan investasi, simpanan dengan pola bagi hasil, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.⁴

³ A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002) hlm 183.

⁴ Burhanuddin.S, *Hukum Bisnis Syaiah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm 67.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dibidang keuangan dan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif. Dalam meningkatkan produktifitas kegiatan usaha kecil, selain mengadakan pembiayaan, koperasi jasa keuangan syariah juga mengadakan kegiatan menabung untuk menunjang pembiayaan. Koperasi Syariah bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu koperasi syariah menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal. Karena tolong-menolong atau kerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, juga bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat.⁵ Islam sebenarnya telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang tolong-menolong atau kerja sama pada surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah:2)*

⁵ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm 15.

BMT adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal Wat Tamwil suatu lembaga yang memiliki dua istilah Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non *profit*, *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Sebagai salah satu usaha BMT mendukung kegiatan masyarakat kecil berlandaskan syariat Islam.⁶

Prinsip operasional BMT didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, *ijarah*, dan titipan (*wadiah*). Karena itu meskipun mirip bank syariah, namun dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari bank syariah. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri untuk pelaku usaha kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologi bila berhubungan dengan pihak bank. BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi sebagai berikut:

1. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan surat keterangan operasional dan PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil).
2. Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Syariah.

⁶ Nurul Huda, *LKS Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 315.

3. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S)⁷.

Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut Al-Qur'an, walaupun dalam Al-Qur'an tidak menyebut secara eksplisit, namun Al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan-aturan dan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti pencatatan, baik laporan keuangan, secara jelas diatur dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqoroh ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..... (Al-Baqarah:282)*⁸

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani terletak di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah (non bank). Dengan berdirinya koperasi

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan LKS*, (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm 116.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm

ini memberikan pembiayaan bagi usaha guna meningkatkan produktifitas dengan sistem bagi hasil. Sistem kerja sama antara pihak koperasi dan pengusaha dalam hal pembiayaan untuk investasi bersama.

Awal berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani bertujuan membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan bagi golongan ekonomi lemah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani juga menjadi solusi permodalan bagi pedagang, petani, pegawai, dan rekan-rekan koperasi dalam hal kerja sama.

Salah satu produk yang ditawarkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani sebagai lembaga keuangan syariah kepada masyarakat adalah pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan prinsip bagi hasil. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagiaan hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.⁹ Akan tetapi sebagian anggota tidak mengetahui atau tidak mengerti terhadap pembiayaan yang

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 21.

digunakan, yang terpenting bagi pihak anggota mudah dalam menerima pinjaman, dan mudah dalam mengangsur tanpa memperdulikan tentang penggunaan akad. Sedangkan dalam akad *musyarakah*, kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal (*equity participation*), dan masing-masing pihak dapat terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, dan keuntungan akan dibagi berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar kesepakatan kedua pihak, secara proporsional, biasanya bergantung pada besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen. Namun yang terjadi tidak demikian, dalam penentuan bagi hasil ditentukan secara nominal tetap per-bulannya. Dengan asumsi bahwa nasabah selalu mendapatkan keuntungan dari usahanya. Padahal terkadang dari anggota yang berprofesi sebagai pedagang penjualannya tidak selalu ramai pasti ada pasang surutnya, begitu pula anggota yang berprofesi sebagai petani belum tentu dalam panennya berhasil, bahkan terkadang gagal panen. Dan untuk sebagian anggota itu pun menerima apa yang telah disepakati Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani. Selain itu sebagian anggota berpendidikan rendah yang bekerja sebagai pedagang, dan petani tidak tahu menahu tentang penerapan penggunaan akuntansi dalam menghitung keuntungan yang didapat, sehingga hal tersebut menyulitkan kedua belah pihak. Dengan demikian dalam

penyaluran dana, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani kesulitan menerapkan produk *musyarakah* secara konsekuen, kendati sebenarnya '*risk factor*' yang menyertainya relatif ringan dibandingkan produk *mudharabah* karena anggota telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha. Fakta lain menjelaskan kepada kita, terdapat Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang aplikasi produk *musyarakah* dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha yang dikelola anggota tidak merugi. Bila kemudian kenyataan berbicara lain, dalam pengertian diluar dugaan usaha nasabah mengalami kerugian, Koperasi Jasa Keuangan Syariah hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan. Ini yang sering dikatakan orang bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah mau berbagi hasil, tetapi tidak mau berbagi rugi.

Memang harus diakui, ketika hendak mengeluarkan produk *musyarakah*, Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengalami dilema. Disatu sisi banyak nasabah membutuhkan fasilitas pembiayaan *musyarakah*, namun disisi lain, Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengelola dana anggota yang mesti dijaga agar tetap utuh dan terbebas dari segala kemungkinan rugi. Padahal karakter dasar produk ini terikat dengan prinsip berbagi untung dan rugi, menyebabkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah selalu khawatir

bilamana modal yang dipercayakan atau disertakan kepada anggota hilang tak tersisa.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dan mengingat pentingnya analisis hukum Islam terhadap akad pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan kepada masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis akad musyarakah yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak?
2. Bagaimana penerapan akad pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002) hlm 42.

Adapun yang ingin hendak dicapai dari tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui jenis akad musyarakah yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak.
2. Untuk mengetahui penerapan akad pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Jurnal Penelitian Al-Ahkam berjudul "Transformasi Akad Muamalah Klasik Dalam Produk Perbankan Syariah" yang ditulis oleh Jamal Abdul Aziz , Fakultas Syariah STAIN Purwokerto. Dalam hasil penelitian tersebut menguraikan penerapan sistem perbankan dalam mentransformasikan akad dalam dua bentuk transformasi akad, pertama, transformasi dengan memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas. Modifikasi sekedar membuat akad aplikatif dalam perbankan. Contohnya dapat dilihat pada aplikasi akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* di perbankan syariah. Kedua transformasi dalam penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik. Akad semacam ini belum

pernah dikenal didalam fiqih muamalah klasik. Akad seperti ini pula dianggap tidak ada bedanya dengan skema kredit yang berbasis bunga tetap.

Jurnal Penelitian Asy-Syir'ah berjudul "Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam" yang ditulis oleh Afdawaiza, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian, bahwa ketidakpastian adalah suatu hal yang intrinsik dalam semua aktivitas ekonomi. Jika seorang agen ekonomi ingin mendapatkan hasil dari suatu usaha-usaha yang nantinya bisa mendatangkan keuntungan. Artinya hasil ketidakpastian tersebut ditentukan oleh usaha yang dilakukan.

Dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang" disusun oleh Zakiyudin (2102258) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Semarang dilakukan berdasarkan akad yang telah disepakati kedua belah pihak dan berdasarkan akad nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh BSM sesuai dengan omset. Dalam prosedur musyarakah BSM Semarang sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur riba (bunga) dan *gharar* didalamnya.

Dalam skripsi dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan” disusun oleh Muhammad Niamil Hida (2101220) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk musyarakah yang dilaksanakan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan belum sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana adanya jaminan dalam akad musyarakah, selain itu kerugian hanya ditanggung oleh nasabah.

Pada skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah di Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayah Purwodadi” disusun oleh Ani Ulfyati (2101038) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan, Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayah Purwodadi pelaksanaannya menggunakan praktek musyarakah dan mudharabah dalam pembagiannya dipatok 2% dari pendapatan kotor dan 33% berasal dari simpanan berjangka, serta belum sesuai dengan prinsip syirkah dalam Islam.

Beberapa hasil penelitian yang diatas membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya memfokuskan tentang akad musyarakah dalam prosedur dan prakteknya ditinjau dari hukum Islam. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Analisis Terhadap

Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar mencapai hasil yang maksimal, ilmiah, dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif*. Maksud dari penelitian yang data diperoleh penulis dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (*dokumen*). Sedangkan maksud dari *kualitatif* adalah penggambaran keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan dan dilakukan sesuai dengan kaidah *non statistik*.¹¹ Sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*.

Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi berupa gambaran mengenai fakta-

¹¹Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002) hlm 75.

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomenan yang diselidiki.¹² Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang konsep musyarakah dalam DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah dan penerapannya di masyarakat.

Penelitian Hukum bersifat *normatif empiris* adalah penelitian hukum dalam mewujudkannya memadukan antara apa yang seharusnya boleh atau tidak dilakukan, menunjukkan salah dan benar (*das sollen*) dengan memandang hukum sebagai kenyataan menyangkut kenyataan sosial (*das sein*)¹³

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa dokumentasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh

¹² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999) hlm 63.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 17.

dari pihak Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak. Dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.

- b. Data Sekunder adalah mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan akad *musyarakah*. Seperti buku karya Ascarya yang berjudul “Akad dan Produk Syariah”, buku karya Hendi Suhendi berjudul “Fiqh Muamalah”, buku karya Muhammad Syafi’i Antonio yang berjudul” Bank Syariah Dari Teori ke Praktek”, serta Fatwa DSN MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan antara lain:

a. Wawancara

Yaitu proses memperoleh informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara

¹⁴ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 30.

menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*).¹⁵

Disini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*Semistruktur interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih fleksibel, tetapi terkontrol, tergantung situasi kondisi serta alur pembicaraan.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak pihak dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak antara lain, Noor Muharor sebagai Direktur, Darmiati sebagai Pengurus, Septia sebagai *Teller* dan anggota Iin Farida, Sukip, Kusrini, Titi Kasmianti, dan Juwari. Tentunya terkait dengan pembiayaan musyarakah yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.¹⁷ Dokumen yang penulis peroleh dalam penelitian ini

¹⁵ M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm 108.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm 123.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinekaa Cipta, 2002) hlm 206.

adalah arsip kantor mengenai profil kelembagaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisa data dan mengambil kesimpulan. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dan dijelaskan. Yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*.¹⁸ Kemudian menafsirkan dengan bentuk *deskriptif* tentang pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah Kopeasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak yang di analisis menggunakan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar dalam penyusunan (desain penelitian) dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun dengan sedemikian secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun dalam kesatuan tak terpisahkan.

¹⁸ Harsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) hlm 209.

BAB I Pendahuluan dalam bab ini akan membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Skripsi, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Membahas konsep tinjauan umum musyarakah dalam bab ini membahas tentang pengertian musyarakah, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam musyarakah, pembagian proporsi keuntungan, manfaat musyarakah, batalnya musyarakah, serta berakhirnya musyarakah.

BAB III Berisikan sistem pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak dalam bab ini membahas latar belakang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak, kegiatan usaha dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak, dan pelaksanaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak.

BAB IV Berisikan analisis mencakup dua hal yaitu analisis terhadap jenis akad pembiayaan musyarakah dan analisis terhadap penerapan akad pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak.

BAB V Penutup bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penyajian masalah tersebut dan saran yang berkaitan dengan skripsi ini dan penutup.

BAB II

Konsep Tinjauan Umum Musyarakah

A. Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.¹

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain:

1. Menurut mazhab Maliki, *syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak bersertifikat.
2. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*.

¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 183.

3. Menurut mazhab syafi'i, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas

sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.²

4. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *syirkah* adalah akad antara dua orang

berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.

5. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* merupakan akad yang

berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.³

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴

² Mas'adi Ghufon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 191.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 125.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 218.

Menurut Fatwa DSN-MUI, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan pengertian *musyarakah* diatas, *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

B. Dasar Hukum Musyarakah

1. Landasan Al-Quran

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum *musyarakah* antara lain:

- a. Dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 12.

..... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : Tetapi jika saudara seibu tersebut lebih dari seorang
Maka mereka bersekutu dalam bagian sepertiga (QS. AnNisa':12).

b. Dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya:Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini... (QS. Shaad: 44).

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shad (38) ayat 24, lafal *al-khutha* diartikan *syuraka*, yakni

orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.⁵

2. Landasan Dalam Hadis Rasulullah SAW

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum musyarakah dinyatakan sebagai berikut:

a. Hadis Abu Hurairah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يُكَيِّنُ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا : رواه ابو داود و صححه الحاكم

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim.*⁶

b. Hadis As-Saib Al-Makhzumi

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 342.

⁶ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), hlm 397.

وَعَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ:
ل: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي: رواه احمد وا ابو داود وابن ماجه

Artinya: Dari As-Saibi Al-Makhzumi R.A, bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota Mekkah maka Nabi bersabda: Selamat datang kepada saudaraku dan teman serikaku. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah⁷

c. Hadis Abdullah bin Mas'ud:

وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا
وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ
أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارُ بِشَيْءٍ: الحديث رواه النسائي

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud R.A ia berkata: Saya bersekutu dengan Amar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa. Riwayat Nasai.⁸

⁷ ibid hlm 397

⁸ibid hlm 398

Dari beberapa hadis tersebut jelaslah bahwa *musyarakah* merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara*, bahkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa *musyarakah* merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.⁹

3. Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.¹⁰

C. Rukun dan Syarat Musyarakah

1. Rukun Musyarakah

⁹ Muhammad Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam juz 3*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah, 1960), hlm 64.

¹⁰ Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah menurut ulama Hanafi, bahwa rukun musyarakah ada dua, yakni ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) menentukan adanya musyarakah. Adapun yang lain mengenai dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti akad jual beli.¹¹

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam musyarakah. Adapun rukun musyarakah menurut ulama yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*aqidain*), Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan.
- b. Barang yang dijadikan syirkah (*mauqud alaih*). Barang yang akan dijadikan syirkah berupa mata uang yang berlaku dinegaranya.

¹¹ Ibid hlm 127.

c. Akad (*shighot*), didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah seorang anggota atau keduanya memberi izin kepada seseorang dalam *tasharuf* (hartanya).

d. Pekerjaan (*al-mal*)¹²

2. Syarat-Syarat Musyarakah

Syarat musyarakah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi musyarakah batal.

Menurut Hanafiah syarat-syarat musyarakah terbagi menjadi empat bagian:

a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk musyarakah baik harta,

maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati

¹² M.Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 122.

oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.

b. Syarat yang berkaitan dengan harta (mal). Didalam hal ini, ada syarat

yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad

musyarakah adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*), seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

c. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadah* yaitu pertama modal

pokok harus sama. Kedua orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah. Ketiga objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.¹³

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang diperlukan dalam musyarakah . Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 129.

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat
kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka
merupakan wakil lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing,
masing, baik bentuk mata uang atau lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).¹⁴

Secara umum, aplikasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dalam Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 128.

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN MUI/IV/2000. Adapun secara lengkapnya isi fatwa tersebut adalah:

a. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),

dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1). Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan pada

tujuan kontrak (akad).

2). Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

3). Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan

hal-hal berikut:

- 1). Kompeten dalam memberikan atau diberi kekuasaan perwakilan.
- 2). Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3). Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- 4). Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan misalnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 5).Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginfestasikan dana untuk kepentingan sendiri.¹⁵

¹⁵ Naf'an , *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 105.

c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian)

1). Modal

- a). Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
 - b). Modal terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - c). Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, dan menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - d). Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
-

2). Kerja

- a). Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya, dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b). Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3). Keuntungan

- a). Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- b). Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional.
 - c). Atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan jadwal yang diterapkan bagi seseorang mitra.
 - d). Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan dan prosenstase itu diberikan kepadanya.
 - e). Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 4). Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.¹⁶
- d. Biaya operasional dan persengketaan
- 1). Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

¹⁶ Trisodini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 10.

- 2). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁷

D. Macam-Macam Musyarakah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan musyarakah akad (*syirkah al aqad*). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 253.

mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.¹⁸

1. Syirkah Amlak

Syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah. Syirkah hak milik dibagi menjadi dua:

- a. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- b. *Syirkah jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 211.

Hukum kedua jenis syirkah ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.¹⁹

2. Syirkah Uqud

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Untuk keabsahan *syirkah uqud* yang harus dipenuhi antara lain:

- a. *Tasarruf* yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan. Dalam *syirkah uqud* keuntungan yang diperoleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota *musyarakah* memiliki

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Vol 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 443.

kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf* . Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.

- b. Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota *musyarakah* nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan mauqud alaih rukun dari *musyarakah*.
- c. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500. Jika keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi *fasid*. Karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan menghilangkan hakikat perkongsiaan.²⁰

Syirkah ini terbagi dalam beberapa macam:

- 1). *Syirkah Inan*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta

²⁰ Nur Khoirin, *Menyoal Kesyariahaan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Press, 2010), hlm 34.

keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukkan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlah dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesempatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian *syirkah inan* seorang tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *syirkah inan* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, *tasarruf*, dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan lainnya, boleh sama dan boleh berbeda, semisal A menanamkan modal Rp. 500.000 B menanamkan modal Rp 1.000.000 dan C menanamkan modal Rp. 300.000. Ketika itu berupa kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.

- 2). *Syirkah Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pebisnis terhadap mereka. Keuntungan yang didapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan prosentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.²¹
- 3). *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama, baik dalam modal, tanggung jawab dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dalam hal ini, adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

²¹ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm 932.

4). *Syirkah Abdan*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap suatu proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sekolah. *Syirkah abdan* ini berupa fisik atau disebut *syirkah al-mal* (kerja).²²

5). *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan seseorang pekerja (*mudhorib*), untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seorang pekerja untuk

²² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Yogyakarta), 2011, hlm 109.

dikelola dan dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan (*profit*).²³

E. Pembagian Proporsi Keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak (akad). Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Contoh: Jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan

²³ Ali Al-Khafif, *Al-Syarikah ai al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1972), hlm 23.

mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp 100 ribu, sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka kemitraan ini tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15 persen dari nilai investasi, kemitraan ini tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah persentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.²⁴

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
3. Imam Abu Hanifah, dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 53.

dapat berbeda-beda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.²⁵

Musarakah yang dipahami dalam lembaga keuangan syariah merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerja dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya mengarah untuk menghasilkan keuntungan (*profit*).

Lembaga Keuangan Islam umumnya tidak sama dengan menjalankan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*) dari proyek mereka berdasarkan pada pembiayaan kontrak musarakah. Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan partner dalam mengelola proyek usaha musarakah, kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu partner dan

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) hlm 220.

bank. Aplikasi dari pembiayaan musyarakah menawarkan pembagian keuntungan sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat persentase partner berdasarkan usaha dalam tangguhan yang berkaitan dengan musyarakah.
2. Menentukan tingkat persentase bagi bank berdasarkan pengawasan dan manajemennya terhadap proyek musyarakah.
3. Menentukan tingkat persentase keuntungan yang akan diterima kedua belah pihak berdasarkan *ratio* perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak musyarakah.²⁶

F. Manfaat Musyarakah

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil salah satunya musyarakah. Dimana musyarakah biasanya dalam pelaksanaan untuk pembiayaan usaha atau proyek nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah

²⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) hlm 122.

proyek selesai, maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini terdiri dari:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah (*cash flow*), sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudential*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah

bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁷

G. Hal-Hal yang Membatalkan Musyarakah

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk *musyarakah*, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagiannya saja.

1. Sebab-Sebab Umum

Hal-hal umum yang membatalkan seluruh akad *musyarakah* antara lain:

- a. Salah satu *syarik* membatalkan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*), menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama Malikiyah, *musyarakah* tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan kedua *syarik* untuk membatalkan, karena *musyarakah*, mereka adalah akad yang mengikat (*lazim*).

²⁷ M.Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm 94

- b. Kematian salah seorang *syarik*. Jika salah satu *syarik* meninggal, maka *musyarakah* menjadi batal, karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik *syarik* lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak.
- c. Salah seorang *syarik* murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
- d. Salah seorang *syarik* gila secara permanen, karena dengan demikian wakil telah keluar dari *wakalah*. Gila secara permanen dihitung sekitar satu bulan atau setengah tahun. Hal ini menjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi.

2. Sebab-Sebab Khusus

Hal-hal khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk *musyarakah* saja sebagai berikut:

- a. Rusaknya modal *musyarakah*, seacara keseluruhan atau modal salah satu *syarik* sebelum dibelanjakan dalam *syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan, sebabnya

adalah karena *mauqud alaih* (objek akad) dalam akad *musyarakah* adalah harta, dan harta dalam *musyarakah* dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan.

- b. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat penting dalam keabsahan akad.²⁸

H. Berakhirnya Musyarakah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain:

1. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh juz 4*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) hlm 792.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. Musyarakah tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.
4. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, namun Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.²⁹

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983) hlm 65.

BAB III

Sistem Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak

A. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak

1. Latar Belakang Pendirian

Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan suatu institusi keuangan non bank, dimana sistem operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Usaha pokok seperti menghimpun dana dan memberi pembiayaan pada usaha produktif. Sebagai usaha mandiri terpadu, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadi pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kalangan bawah (kecil), yang sebagian besar berada di pedesaan. Lembaga Keuangan Syariah seperti ini mewadahi masyarakat untuk menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha anggota yang produktif dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.¹ Kenyataan tersebut membuka kesadaran beberapa pihak terhadap kelebihan dan keunggulan sistem perbankan syariah.

¹ Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, (Bogor: Akatiga, 2002) hlm 47.

Konsep syariah semakin populer dan kian banyak pelaku keuangan yang tertarik karena dianggap mampu memberikan keuntungan lebih yang tidak bisa diberikan oleh lembaga keuangan konvensional dengan bertumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memperkuat jaringan layanan dan dengan sendirinya akan meningkatkan eksistensi perbankan syariah. Perbankan syariah kini makin memperluas jaringan yang diikuti dengan produk-produk inovatif, baik dalam pengimpun dana maupun penyaluran dana pembiayaan. Dimana hubungan yang timbul dari fungsi intermediasi yang dijalankan dengan baik mengakibatkan kesan bukan antara pihak bank dan nasabah, akan tetapi dalam bentuk hubungan mitra kerja yang terkandung suatu bentuk kepercayaan dan keinginan untuk dapat berbagi keuntungan secara adil dan merata demi kemajuan bersama.

Melihat potensi besar pada lembaga-lembaga keuangan syariah dalam peranya ikut membangun perekonomian masyarakat, maka timbul keinginan anggota masyarakat untuk merintis berdirinya sebuah lembaga keuangan syariah. Maka didirikanlah sebuah lembaga keuangan syariah yang dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani.

Berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani adalah sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi

masyarakat bawah (pengusaha kecil) dengan berlandaskan syariah yang bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, dan sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil yang didirikan atas dasar kepentingan masyarakat. Maka atas dasar tersebut berdirilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani yang bertempat di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan didirikan pada tanggal 07 Juni 2007 dengan badan hukum nomor: 112/BH/XIV.8/KDK.11-03/V/2007.

Pada awal operasinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani ber nama Koperasi Simpan Pinjam Pringgodani, namun pada tanggal 22 Agustus 2010 mengalami perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga merubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani. Adapun wilayah keanggotaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, meliputi masyarakat di wilayah Kabupaten Demak dan sekitarnya. Berdirinya koperasi syariah ini sangat didukung oleh masyarakat. Terbukti dari sejak didirikannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dengan modal sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) hingga kini berhasil mencapai angka Rp.

2.590.130.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).²

Sampai Saat ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani telah memiliki satu kantor pusat yang cukup megah bertempat di jalan Raya Gajah no.40 dan dua kantor cabang beralamat di jalan Nurcahya no.03 kantor cabang Demak dengan di jalan Raya karanganyar kantor cabang Karangayar, serta satu kantor kas pembantu di Desa Babalan. Dan masih ada rencana untuk membangun kantor-kantor cabang baru, untuk meningkatkan dan mengembangkan jaringan dan layanan yang lebih luas, agar dapat menjangkau masyarakat bawah (kecil).³

Diharapkan dengan didirikannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang akomodatif dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Disamping hal tersebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani juga menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat muslim serta dapat bermuamalah sesuai syariat Islam.

² Hasil Wawancara dengan Noor Muharor selaku Direktur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, (Demak:Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, 15 November 2016).

³ Arsip Dokumen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani.

2. Tujuan, Visi dan Misi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani memiliki motto, visi dan misi antara lain:

a. Tujuan

- 1). Kemuliaan Dengan Taqwa Melalui Hidup Berjamaah.

b. Visi

- 1). Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang sehat, efisien, amanah dan mampu memelihara kemuliaan dengan taqwa.

c. Misi

- 1). Mendukung dan menjamin terlaksananya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan ZIS secara tertib.
- 2). Selalu mengoptimalkan keterlibatan para anggota utamanya dalam hal pemupukan modal.
- 3). Melaksanakan efisiensi disegala bidang dalam rangka memperoleh keuntungan optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4). Menjalankan fungsi sosial melalui Qordul Hasan dan lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan, visi, dan misi tersebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani melakukannya dengan cara memberikan berbagai fasilitas yang sekiranya dapat membantu permodalan usaha bagi masyarakat menengah bawah, melalui berbagai macam produk baik untuk simpanan ataupun pembiayaan yang disediakan. Dengan cara memberikan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang sangat mudah dan memungkinkan untuk dipenuhi oleh masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah untuk menjadi nasabah pembiayaan. Sehingga nantinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dapat berperan aktif dalam laju perekonomian masyarakat kecil.

Sebagai sebuah lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap operasional produknya, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang dapat menjauhkan masyarakat dari praktek ribawi sekaligus melepaskan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir sehingga keadilan ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil dapat diwujudkan.

3. Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, maka menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cangkupan bidang masing-masing. Struktur ini berfungsi agar tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing dalam organisasi. Dalam struktur organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani terdiri dari:

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT), merupakan alat perlengkapan organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota Tahunan ini diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun, sebagai pertanggung jawaban pengurus kepada anggota.
- b. Pengurus, merupakan yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pengelolaan lembaga dan usaha, serta memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota Tahunan.
- c. Dewan Pengawas Syariah, adalah sebuah badan yang anggotanya diangkat oleh pengurus lewat persetujuan Rapat Anggota, dan badan ini diberi wewenang dan kekuasaan dalam pengawasan syariah

- d. Pengawas, adalah seseorang yang diangkat oleh pengurus yang diberikan wewenang dan kekuasaan dalam pengawasan pembukuan, administrasi, dan keuangan.
- e. Pengelola adalah sekumpulan orang, yang diangkat pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus, serta berkewajiban mengelola lembaga sebaik dan semaksimal mungkin, terdiri dari direktur, manager dan staf.⁴

Sesuai dengan tingkatan struktur organisasi di atas maka struktur organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani adalah sebagai berikut:

a. Pengurus

- 1). Ketua : H. Ahmad Jazeri, SE
- 2). Sekertaris : H. Muhtar, S.Pd.
- 3). Bendahara : H. Soeyono

b. Dewan Pengawas Syariah

- 1). KH. Abdul Wahid Hasyim

c. Pengawas

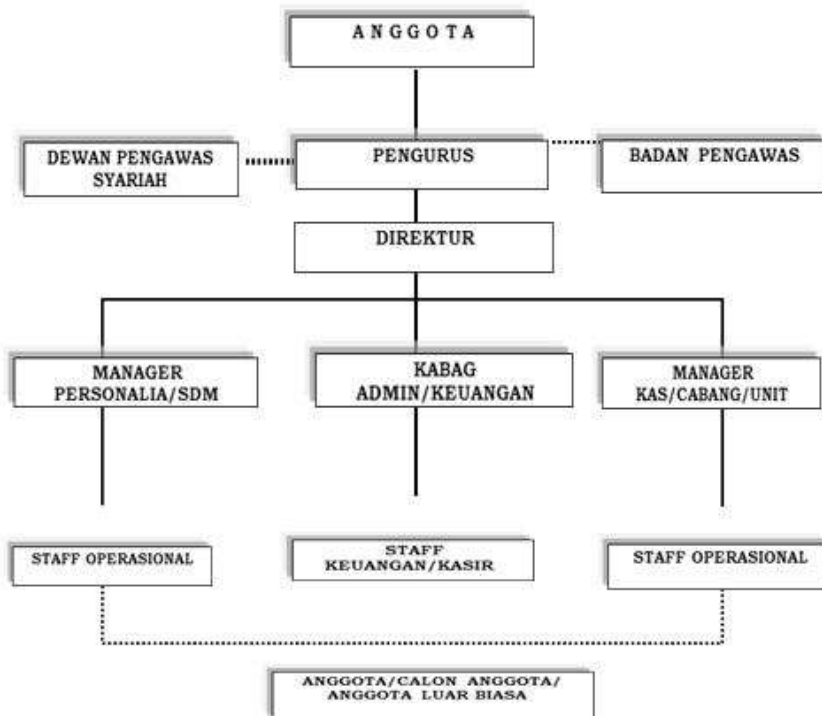
- 1). Ketua : Drs. H. Abdul Khalim
- 2). Anggota : Suwandi, S.Pd.
- 3). Anggota : Muslikin, S.Pd.

⁴ Ibid.

d. Pengelola

- 1). Direktur : Noor Muharor, SE
- 2). Manager Admin : Hj. Darmiati
- 3). Manager Personalia : Tahta Fikruddin, SE
- 4). Kepala Accounting : Fida Yaumil Fitri
- 5). Kepala Kas Gajah : Lailatun Nafiah
- 6). Marketing : Asharul Khomar
Rahmatul Mufidah
Arie Andriyanto
- 7). Kepala Kas Demak : Hanna Farida, S.Pd
- 8). Marketing : Abdul Azis
Ahmad Yusro
Endang Suyanti, SE
- 9). Kepala Kas Karanganyar : Sri Mulyani
- 10). Marketing : Musdalifah
Hudallah Afif
Khayatul Mustaqiroh, S.
Pd

Untuk melihat gambaran secara keseluruhan organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, maka akan dipaparkan sebagai berikut:



B. Jenis dan Layanan Produk di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani

Ada dua jenis layanan yang disediakan yaitu berupa pembiayaan dan simpanan. Adapun produk dari masing-masing layanan tersebut sebagai berikut:⁵

1. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil
 - b. Pembiayaan Murabahah
 - c. Pembiayaan Musyarakah
 - d. Pembiayaan Qordhul Hasan

2. Simpanan
 - a. Simpanan Amanah
 - b. Simpanan Si Suka Berjangka
 - c. Simpanan Sukarela
 - d. Simpanan Sisuqur
 - e. Simpanan Siaman
 - f. Simpanan ZIS
 - g. Simpanan Simabrur

⁵ Hasil Wawancara dengan Darmiati selaku Manager Administrasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, (Demak:Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, 20 Desember 2016).

Adapun karakteristik atau detail dari layanan produk pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan

- a. Bai' Bitsaman Ajil/ BBA (Pengadaan Barang Cicilan)

Bai' Bitsaman Ajil adalah akad jual beli berupa pengadaan barang dengan cara angsuran/ cicilan. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh anggota kepada lembaga adalah sejumlah harga barang modal ditambah dengan mark up (keuntungan) yang telah disepakati bersama.

- b. Murabahah (Pengadaan Barang Jatuh Tempo)

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan dalam pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo.

- c. Musyarakah (Bagi Hasil Bersyarakah)

Musyarakah adalah jenis pembiayaan modal kerja sama dimana pihak lembaga menyediakan sebagian modal usaha dan jika dimungkinkan lembaga dapat ikut dalam proses manajemen.

Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian, sesuai dengan proporsi dalam bentuk nisbah. Apabila usaha mengalami kerugian, maka masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan bersama.

d. Qordhul Hasan

Qordhul Hasan, merupakan jenis pembiayaan berupa kebajikan, dimana lembaga tidak mengambil bagi hasil dari pembiayaan tersebut, dan pembiayaan ini semua hanya untuk kepentingan sosial (*Social Oriented*).

Adapun jenis produk dari layanan berupa simpanan sebagai berikut:

a. Simpanan Amanah

Simpanan Amanah merupakan singkatan dari Simpanan Anggota Aman Nyaman Muamalah dalam penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah dimana simpanan yang dititipkan disalurkan pada pembiayaan-pembiayaan produktif. Produk ini diperuntukkan masyarakat umum, yang setoran awalnya Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya

terserah pada anggotanya. Nisbah bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap akhir bulan sesuai keuntungan yang didapat

b. Simpanan Si Suka Berjangka

Simpanan Si Suka Berjangka merupakan jenis simpanan jatuh tempo yang hanya penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu penarikan yang telah disepakati bersama pada awal setoran. Simpanan ini jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela merupakan penyerahan dana dimana pihak penyimpan hanya menitipkan dananya semata tanpa mengharapkan nisbah bagi hasil, atas persetujuan penyimpan, lembaga diperkenankan mengalokasikan untuk kepentingan anggota, simpanan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu.

d. Simpanan Sisuqur

Simpanan Sisuqur adalah singkatan dari Simpanan Qurban, merupakan jenis simpanan yang khusus untuk mewujudkan keinginan anggota yang ingin melaksanakan Qurban. Setoran dapat dilakukan secara harian, mingguan,

dan bulanan, tetapi penarikan hanya dapat dilakukan pada saat datang musim Qurban tiap tahunnya.

e. Simpanan Siaman

Simpanan Siaman merupakan penyerahan dana/uang dari nasabah kepada pihak pengelola dana untuk digunakan dalam usaha halal, dimana keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

f. Simpanan ZIS

Simpanan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) merupakan simpanan khusus zakat, infaq, dan shodaqoh, dimana dana ini disalurkan dalam bentuk kredit qordhul hasan yaitu pinjaman kebajikan untuk usaha yang produktif bagi yang berhak.

g. Simpanan Simabrur

Simpanan yang diperuntuhkan khusus untuk merencanakan ibadah Haji anggota/ calon anggota, dimana pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani akan mengelola dana tersebut secara produktif.

C. Praktek Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani

Segala transaksi yang dilakukan dalam kaidah hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bukti perjanjian atau akad

diantara kedua belah pihak. Akad merupakan inti dari sebuah perjanjian atau transaksi dimana didalamnya termaktub segala ketentuan, kebijakan, keputusan, dan kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi yang memiliki kekuatan hukum dan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan kesepakatan dan jika terjadi suatu yang tidak diinginkan. Begitu pula yang berlaku pada pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani.

Praktek pembiayaan musyarakah merupakan kesepakatan antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dan nasabah guna menggabungkan modalnya dalam suatu usaha yang halal dan produktif, dimana porsi modal yang dicampurkan berbeda dalam jumlah, karena Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani memberikan tambahan modal sesuai dengan kebutuhan pembiayaan.⁶

Dalam pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, semua anggota yang akan mendapatkan pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani harus melalui permohonan secara tertulis, baik untuk

⁶ Arsip Dokumen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani

pembiayaan baru, perpanjang jangka waktu, maupun tambahan pembiayaan melalui prosedur sebagai berikut:⁷

1. Anggota harus datang tanpa diwakilkan. Anggota mengisi formulir permohonan pinjaman yang berisi data diri calon peminjam dan jumlah pinjaman yang telah disediakan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dilampiri berkas-berkas persyaratan permohonan pembiayaan.
2. Formulir permohonan pembiayaan tersebut diserahkan oleh pengurus bidang pembiayaan pada bagian sub bidang AO (*Account Officer*) untuk melakukan identifikasi dan seleksi anggota.
3. Formulir tersebut selanjutnya diserahkan kepada kepala bagian pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan jika semua syarat dipenuhi.
4. Pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani menganalisa dana yang tersedia (plafon pembiayaan) dan data pribadi anggota serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha anggota dengan *on the spot* (meninjau lapangan) dengan memperhatikan lokasi usaha dan rumah tinggal, barang-barang dagang/ produk/ stok barang, lokasi jaminan

⁷ Hasil Wawancara dengan Septia selaku Teller Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, (Demak:Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, 20 Desember 2016).

dan memperhatikan faktor 5C (*character, capacity, capital, condition of economic, and collateral*).

5. Setelah pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani selesai menganalisa dan semua persyaratan dipenuhi, maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikat jaminan.
6. Penarikan pembiayaan atau pencairan biaya, akan dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, sekitar maksimal 2-3 hari setelah permohonan diajukan.

Adapun formulir yang digunakan dalam proses penyaluran pembiayaan antara lain:

1. Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) , berupa permohonan pembiayaan nasabah beserta rincian serta agunan (jaminan) yang disertakan.
2. Surat Pernyataan Agunan (SPA), berisi pernyataan tertulis dari anggota, bahwa agunan yang disertakan benar milik anggota.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan SPP (LHP), berupa rincian identitas anggota, karakter , estimasi kondisi usaha, agunan anggota, tujuan penggunaan pembiayaan, modal dan usulan pembiayaan. Bagian akhir laporan ini merupakan hasil analisis bagian pembiayaan.

4. Lembar Persetujuan Pembiayaan (LPP) , berisi pernyataan dari direksi bahwa permohonan pembiayaan nasabah disetujui dan dapat direalisasikan
5. Akad Pembiayaan, berupa pernyataan bahwa kedua belah pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dan anggota, telah melakukan perjanjian pembiayaan tertentu dan dilengkapi dengan rincian pembiayaan yang dibutuhkan.
6. Surat Pengakuan Menerima Pembiayaan (SPMP), berisi pernyataan nasabah bahwa telah menerima pembiayaan jenis tertentu dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani. Sejumlah tertentu yang akan diangsur sesuai kesepakatan bersama.
7. Slip Setoran (SS), berisi jenis setoran tertentu dari anggota.
8. Kwitansi Realisasi Pembiayaan (KRP), berupa nilai pembiayaan dan dilengkapi dengan nomor rekening simpanan nasabah dan nomor akad pembiayaan.
9. Kartu Pembayaran Angsuran (KPA), merinci besarnya angsuran, total angsuran, dan saldo pinjaman nasabah. Kartu ini menjadi bukti angsuran yang dipegang nasabah.
10. Kartu Pembiayaan (KP), merinci pokok dan margin angsuran, pokok dan margin sisa angsuran, total sisa angsuran, sampai jumlah tunggakan apabila nasabah tidak mengangsur pada

jatuh tempo. Kartu ini menjadi bukti angsuran yang disimpan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani.

Hal-hal yang diperhatikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dalam mengidentifikasi dan menyeleksi anggota dalam pembiayaan antara lain:

1. Anggota mempunyai aktifitas usaha produktif yang dinilai layak.
2. Anggota tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada pemerintah di bawah binaan dinas/instansi teknis.
3. Anggota tidak tercatat sebagai debitur bermasalah.
4. Pinjaman sebagai modal kerja bukan investasi dan konsumsi.
5. Memperoleh rekomendasi dari dinas/instansi teknis dan layak melakukan pembiayaan.

Sebelum pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, melakukan pencairan dana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota antara lain:

1. Foto copy KTP suami/istri yang masih berlaku.
2. Foto copy KK (Kartu Keluarga) atau surat nikah.
3. Jaminan berupa (BPKB/ sertifikat) milik sendiri atau bukan atas nama sendiri harus disertai dengan dokumen yang memperkuat bukti kepemilikan.
4. Jaminan harus dibawa pada saat pendaftaran dan pencairan dana (realisasi pembiayaan).

Setelah beberapa syarat dipenuhi, maka anggota sudah resmi menjadi anggota dan boleh mengambil dana pembiayaan. Setelah adanya pelaksanaan pembiayaan, nasabah harus menggunakan dana tersebut dengan usaha yang semestinya.⁸

D. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani

Lembaga keuangan syariah tentunya memiliki perbedaan dengan lembaga konvensional, diantara perbedaan itu terletak pada sistem bagi hasil dan sistem bunga. Ketika membahas sistem bunga, maka penentuan (bunga) dibuat sebelum waktu akad tanpa pedoman untung dan rugi. Namun dengan sistem bagi hasil penentuan bagi hasil dibuat, ketika akad berlangsung dengan pedoman pada kemungkinan untung maupun rugi (besarnya jumlah diketahui sesudah berusaha).

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada jumlah nominal pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan memprediksi keuntungan yang diperoleh, kemudian nasabah mengangsur dalam tiap bulannya.

Untuk prosentase bagi hasil sudah ditentukan diawal oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dan itu sudah

⁸ ibid

menjadi ketentuan dari pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani.

Pembayaran nisbah kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani diberikan pada tiap akhir yang bersangkutan, untuk pelunasan modal dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dilunasi pada waktu berakhirnya kontrak musyarakah.

Dalam pelaksanaan musyarakah pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani hanya memberikan tambahan modal dan tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha, sedangkan nasabah sebagai pelaksana usaha dan menyiapkan modal untuk digabungkan dengan modal pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani.

Tanggung jawab apabila ada terjadi kerugian dalam usaha ditanggung oleh nasabah, dan nasabah tetap wajib membayar modal yang diberikan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dan anggota harus membayar bagi hasil yang telah ditentukan hingga masa kontrak berakhir.⁹

E. Hambatan- Hambatan dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani

⁹ Surat Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani.

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani yang diberikan kepada masyarakat tidak selalu lancar, dapat pula mengalami hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan. Diantara hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Dalam hal debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pokok atau tambahan bagi hasil dikarenakan pengguna pembiayaan tidak sesuai rencana dan tidak lancarnya usaha debitur sehingga mengalami kesulitan dalam permodalan untuk melanjutkan usaha.
2. Debitur tidak mempunyai administrasi yang lengkap terhadap persyaratan yang telah ditetapkan, karena pada saat mengajukan permohonan pembiayaan, debitur tidak mengetahui beberapa syarat yang ditetapkan. Seperti tidak lengkapnya jaminan yang harus disertai dokumen yang memperkuat buku kepemilikan.
3. Debitur wanprestasi adalah keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau debitur tidak dapat membayar pinjaman yang telah diterima.

F. Problematika Sistem Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani

Dalam mengimplementasikan sistem musyarakah dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani yang merupakan lembaga keuangan syariah adalah adanya *syarik* (mitra) kebersamaan namun dalam operasional terdapat problematika dalam pelaksanaan antara lain:¹⁰

1. Pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani hanya sebagai pengawas dalam manajemen bersama.
2. Tingkat kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) anggota masih minim sehingga pendekatan intensif dalam usaha peningkatan aset perlu diperhatikan.
3. Jumlah staf Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani yang masih sedikit sehingga pelaksanaan musyarakah urusan manajemen yang seharusnya ditangani dua belah pihak menjadi tidak efektif.

¹⁰ Noor Muharor, Op.cit

BAB IV

Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak

A. Analisis Terhadap Jenis Akad Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak

Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang bertujuan sebagai anjuran para ulama adalah untuk memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan Islam bagi kebanyakan muslim bukan hanya sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam sistem finansial itu dipandang oleh Muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan syariah salah satunya untuk menarik investor dengan sukses bukan tergantung pada tingkat lembaga keuangan itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan Islam.¹

Kehadiran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai

¹ Zaenal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Alvabet: Jakarta, 2002) hlm 16.

tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha mikro dan pelaku ekonomi lain. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya lembaga atas terlaksana berbagai sistem yang telah diusung untuk mencapai tujuan tersebut.

Sistem yang berhasil diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani adalah produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan direalisasikan salah satunya dengan akad *musyarakah* dimana kedua belah pihak bekerja sama untuk mengabungkan modal dan dikelola untuk menjalankan usaha/ proyek, serta masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan kedua belah pihak.²

Demikian pula hal ini memungkinkan apabila ada dua orang atau lebih yang memiliki modal, dibandingkan melakukan usaha secara sendiri akan lebih efektif dan menguntungkan apabila bergabung dan bekerja sama. Berdasarkan teori perbankan syariah prinsip *musyarakah* dijadikan sebagai salah satu alternatif sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) demikian pula dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani menerapkan prinsip *musyarakah* ke dalam salah satu produk pembiayaan. *Musyarakah* biasa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan

² Ibid hlm 17

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Adapun setelah proyek selesai, maka nasabah mengembalikan dan tersebut dengan bagi hasil yang telah disepakati untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dalam menyediakan modal tambahan dalam suatu usaha/proyek yang diperuntuhkan untuk anggota.

Adapun sistem musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani meliputi tata cara sebagai berikut:³

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dapat memberikan fasilitas suatu proyek yang layak mendapatkan pembiayaan berprinsip musyarakah (*project financing participation*)
2. Dalam skema pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dengan anggota menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan nominal yang telah disepakati bersama.

Hasil Wawancara dengan Darmiati selaku Manager Administrasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, (Demak:Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, 20 Desember 2016).

3. Semua pihak termasuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen usaha. Setidaknya dalam hal memberi masukan atau saran dalam suatu usaha.
4. Semua pihak melalui komunikasi/negoisasi menyetujui *nisbah* dari keuntungan pembiayaan usaha yang telah ditetapkan di awal kontrak.
5. Apabila terjadi kerugian dalam usaha maka ditanggung sepenuhnya oleh anggota.
6. Semua biaya hasil pendapatan didasarkan pada laba bersih, artinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani tidak memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh anggota dalam menghasilkan keuntungan.
7. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelolaan usaha anggota yang dibiayai oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani tidak ikut mengelola.

Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan para anggota. Karena dalam pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya

modal yang digunakan, jika modal besar maka produk yang dihasilkan pula besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan sedikit dan pendapatan diperoleh pun sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat akan sejahtera.⁴

Dalam pengembangannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani menggunakan produk pembiayaan dengan akad *musyarakah* yang diberikan terhadap anggota yang membutuhkan tambahan modal, dimana pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dapat memberikan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah dan cara melunasinya dengan mengangsur dapat dilakukan dalam waktu mingguan maupun bulanan sesuai kesepakatan dari awal antara pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani serta nasabah.

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana sistem *musyarakah* yang dilaksanakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani terkait tentang direalisasikannya tersebut, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan

⁴ Ibid

mengadakan wawancara ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan *musyarakah*.

Adapun data-data yang dapat dirangkum dari hasil wawancara ke beberapa anggota diantaranya adalah hasil wawancara dengan Sumarti, demi mendapatkan tambahan modal, beliau mengajukan pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, yaitu dengan akad pembiayaan *musyarakah* dimana dalam hal ini pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani yang menentukan akad tersebut. Beliau sebagai pedagang kecil mendapat dana untuk mengembangkan usahanya. Beliau melakukan pembiayaan sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dimana beliau harus mengangsur selama 20 bulan dengan angsuran per bulan Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).⁵

Kemudian dengan Titi Kasmiati beliau seorang petani mengajukan pembiayaan *musyarakah* sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Dimana

⁵ Hasil Wawancara dengan Sumarti selaku nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, (Demak:Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, 20 Desember 2016).

beliau harus mengangsur selama 4 bulan dengan angsuran sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).⁶

Begitu pula dengan Jamilah, beliau mengajukan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana beliau berprofesi sebagai petani. Dalam hal ini beliau mengangsur sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 4 bulan.⁷

Jika dilihat dari uraian tersebut, maka akad pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani termasuk *syirkah inan* yaitu pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dan nasabah secara bersama-sama berserikat dalam hal modal dan keuntungan, dan tidak mensyaratkan persamaan modal dan keuntungan dan pertanggung jawaban hanya sebatas penyertaan modal.

Dalam penggunaan *syirkah inan* terdapat beberapa kriteria sebagai berikut:

⁶ Hasil Wawancara dengan Titi Kasmiati selaku nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, (Demak:Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, 20 Desember 2016).

⁷ Hasil Wawancara dengan Jamilah selaku nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, (Demak:Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, 20 Desember 2016).

1. Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus identik.
2. Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi juga dapat menggugurkan hak tersebut dari dirinya.
3. Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal, masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar negosiasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan kerja, atau penanggung resiko dari salah satu pihak.
4. Kerugian keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing.⁸

Musarakah yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani adalah pembiayaan dengan sistem kemitraan dengan nasabah dalam sebuah pekerjaan/proyek dimana kedua belah berkontribusi serta menetapkan bagi hasil/keuntungan terhadap suatu usaha. Jumlah kewajiban yang harus dibayar nasabah kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani sesuai dengan kesepakatan bersama. Sistem *musarakah* yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani berupa nominal tetap berdasarkan jumlah dana yang dipinjam nasabah. Jadi dalam hal

⁸ Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (UII Press: Yogyakarta, 2000) hlm 11.

ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani menetapkan angsuran pembayaran secara *flat* (tetap).

B. Analisis Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani merupakan lembaga yang mengemban prinsip syariah, sehingga prinsip tersebut menjadi pokok dasar untuk berfikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan lembaga pengemban prinsip syariah yaitu adanya cita-cita yang menjadi pokok dasar yang berlandaskan syariah. Dengan prinsip ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Dengan demikian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani mengajak dan menciptakan masyarakat untuk melakukan kerja sama ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah serta menjauhi riba. Karena dalam ekonomi Islam memiliki kelebihan yaitu memberikan kode etik dalam pelaksanaan ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spritual.

Pemenuhan materi dalam Islam bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan tetapi sebagai suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang

manusia sebagai khalifah di bumi. Untuk memenuhi kebutuhan materi tersebut maka dianjurkan untuk bekerja dan berusaha. Usaha tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk perdagangan, pertanian, perindustrian, dan bentuk kerja sama lainnya.

Dalam hal ini kerjasama yang tepat dilaksanakan adalah *musyarakah* dimana kesepakatan antara pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dan anggota guna menggabungkan modalnya dalam suatu usaha yang halal serta produktif dengan porsi modal yang berbeda dalam jumlah, karena Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani hanya memberikan tambahan modal sesuai kebutuhan anggota.

Musyarakah adalah salah satu akad perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran dana. Demikian pula Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani menerapkan prinsip ini dalam salah satu produk pembiayaannya.⁹

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kesepakatan antara pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dan anggota untuk membiayai proyek dimana kedua pihak saling menyediakan

⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Paramadina: Jakarta, 2004) hlm 88.

dana. Adapun transaksi *musyarakah* ini dilandasi atas adanya keinginan para pihak untuk bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki secara bersama.

Perlu diketahui bahwa *musyarakah* yang terdapat pada literatur fiqh muamalah adalah suatu kerja sama kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa resiko ditanggung secara bersama. Akan tetapi sistem kerja *musyarakah* yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani adalah antara lembaga keuangan di satu pihak dengan anggota di pihak lain. Dan kita dapat mengetahui bahwa dalam lembaga keuangan apabila terjadi transaksi pembiayaan maka nasabah wajib mengembalikan modal melalui angsuran perbulan atau pertahun dengan penyertaan bagi hasil yang telah disepakati.

Musyarakah pada umumnya perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau menutup usaha. Apabila usaha ditutup atau dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra

usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.¹⁰

Prinsip *musyarakah* dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak *musyarakah* berdasarkan kesepakatan yang telah dikomunikasikan antara kedua belah pihak. Pada umumnya pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani memberikan modal dan manajemen usahanya kepada mitra. *Musyarakah* boleh dilakukan antara individu atau individu dan lembaga maupun antar lembaga berbadan hukum. Dimana kontrak *musyarakah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasi pada keuntungan.

Tentunya dalam penggunaan kontrak *musyarakah* tidak terlepas dari rukun yang harus dipenuhi antara lain:

1. *Shigat* merupakan rukun akad, karena melalui akad inilah diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan akad. *Shigat* dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu

¹⁰ Ascarya , Akad dan Produk Bank Syariah , (Raja Grafindo: Jakarta, 2007) hlm 52.

ketentuan. Ijab dan qabul dapat berbentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Ijab dan qabul ini harus jelas pengertiannya, harus sesuai dan bersambung dan menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari para pihak yang berakad. *Shigat* dalam akad ini berbentuk tertulis yang diberikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani kepada anggota untuk menerima persetujuan dalam melakukan kesepakatan.

2. Pihak-pihak yang berakad/ mitra usaha yang melakukan kontrak usaha harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Pihak yang berakad disini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dengan anggota. Dari sudut pelaku (*aqid*) para fukaha merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai *aqid*, yaitu:
 - a. *Aqil* (berakal/dewasa), hanya orang yang berakallah yang dapat melakukan transaksi secara sempurna. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penipuan dan sebagainya.
 - b. *Tamziz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran. Dalam hal ini para mujtahid dari masing-masing mazhab dalam fiqh mengemukakan logika hukum yang bisa menjadi pegangan tentang sah atau batalnya transaksi (akad) yang dilakukan oleh anak yang telah dapat membedakan (*mumayiz*), orang buta dan orang gila.

- c. *Mukhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih), yaitu masing-masing pihak harus lepas dari paksaan atau tekanan.

11

3. Objek akad yaitu modal, kerja, dan keuntungan.

- a. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak terjadi keistimewaan. Dalam realisasinya hanya modal yang diperoleh dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani yang dicantumkan di formulir pembiayaan.
- b. Kerja adalah partisipasi mitra dalam pelaksanaan para mitra dalam melakukan tindakan tentunya dalam bidang *musyarakah*. Akan tetapi dalam hal ini yang melakukan kerja dalam hal ini adalah anggota sedangkan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah hanya memantau usaha yang dilakukan nasabah. Tentunya pada prinsipnya dalam *musyarakah* ini harus terlibat dalam mengelola suatu usaha tersebut.

¹¹ Gemala Dewi , Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransiaan Syariah di Indonesia , (Prenada Media: Jakarta, 2005) hlm 17.

- c. Keuntungan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan bisnis, dalam bentuk nisbah atau persentase misal 20% masing-masing partner. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan syarat *syirkah uqud* misalnya seperti yang terjadi dengan Titi Kasmianti beliau seorang petani mengajukan pembiayaan *musyarakah* sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Dimana beliau harus mengangsur selama 4 bulan dengan angsuran sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Padahal keuntungan untuk masing-masing *syarik* harus ditentukan dengan nisbah, dalam bentuk porsi 20%, 30%, atau 40%. Dengan melihat ilustrasi tersebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dalam pembayaran tidak berpatokan dengan bentuk persentase (%), namun dengan nominal tetap, begitu pula pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani sudah menentukan keuntungan diawal akad, sehingga bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No: 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah* bahwa keuntungan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal, apabila hal tersebut terjadi maka belum memenuhi peraturan tersebut, sebab keuntungan merupakan salah satu *muaqud alaih*.¹²

¹² Nur Khorin , Menyoal Kesyarahan Bank Syariah , (IAIN Walisongo Press:

Walaupun perjanjian pembiayaan *musyarakah* antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dengan nasabah secara normatif telah sah, namun dalam akad tersebut belum sesuai dengan prinsip *musyarakah* menurut syariah. Prinsip tersebut seharusnya berjalan sesuai dengan yang telah dicita-citakan, akan tetapi terdapat beberapa hal yang terjadi membuktikan lembaga masih belum konsisten terhadap prinsip syariah yang dijadikan dasar dalam kinerjanya. Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan keuntungan/nisbah bagi hasil

Keuntungan adalah sebuah imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam pembagian keuntungan (*profit*) pada akad *musyarakah* harus dengan persentase, bukan dengan nominal tertentu. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti dapat mengakibatkan kontrak menjadi batal. Ketentuan bagi hasil yang seharusnya:

- a. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- b. Keuntungan (bagi hasil) tergantung pada usaha/proyek yang dijalankan. Apabila merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.

- c. Jumlah pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.¹³

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, proporsi tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak, begitu pula dengan pendapat mazhab Malik dan Syafi'i bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya sesuai proporsi modal yang disertakan. Menentukan suatu jumlah tetap bagi mitra (*syarik*) tidak diperbolehkan lantaran laba (keuntungan) yang diperoleh belum pasti. Menurut fatwa DSN MUI tentang *musyarakah* bahwa keuntungan mitra (*syarik*) harus dibagikan secara proporsional atas dasar keseluruhan keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Namun pembagian keuntungan/bagi hasil akad musyarakah yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani ditetapkan dengan nominal yang tetap (*flat*) dan ditetapkan di awal serta bukan dalam bentuk persentase.

2. Potensi terjadinya riba

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi Islam para ulama memberikan definisi, bahwa

¹³ ibid hlm 77.

riba merupakan padanan pengganti yang tidak dibenarkan Islam yang diisyaratkan oleh satu dari dua orang yang berakad.

Dimana adanya proyeksi pendapatan yang sudah dipatok dengan jumlah tetap (*flat*) oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani, menjadikan nisbah bagi hasil tersebut mirip dengan bunga pada Bank konvensional. Dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah melarang kegiatan yang meliputi bunga (riba).

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian keuntungan pada pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani belum sesuai dengan pembagian keuntungan akad *musyarakah* menurut fiqh maupun fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini karena cara pembagian keuntungan yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani yang pembagian keuntungan tetap dan dalam bentuk nominal berjumlah tetap menyerupai bunga tetap.

3. Pembagian kerugian

Para ulama sepakat bahwa setiap mitra (*syarik*) menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih maupun kurang. Apabila tidak

demikian maka akad *musyarakah* tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i menyatakan porsi keuntungan dan kerugian harus sesuai penyertaan modal masing-masing pihak. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dengan porsi modal yang disertakan, akan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini dikenal dalam pepatah "keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu bergantung pada proporsi investasinya. Namun dalam *musyarakah* yang dilaksanakan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dan nasabah berkebalikan, dimana pihak anggota menanggung penuh kerugian terhadap pembiayaan *musyarakah*. Sehingga dalam hal ini tidak memiliki posisi yang setara antara mitra dengan mitra, tetapi pola ini menyamai pola *qard* (piutang) dimana posisi kedudukan berbeda.

4. Adanya tanggungan berupa jaminan

Menurut fiqh klasik tidak diperbolehkan adanya jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*, karena kedudukan para pihak sebagai mitra (*syarik*) yang memiliki kedudukan sama. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya jaminan dalam *musyarakah* namun jaminan dikenal dalam akad *qard* (hutang piutang). Dimana dasar pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu bentuk kerja sama bukan merupakan hutang-piutang

Begitu pula dalam fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebut bahwa prinsipnya pembiayaan *musyarakah* ini tidak ada jaminan, namun untuk menghindari adanya penyimpangan, maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan, sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh anggota sebagai *syarik*. Jaminan dijadikan sebagai pengaman dana, sehingga untuk memastikan nasabah dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan nasabah. Namun dalam kontrak *musyarakah*, pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani juga tidak boleh memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan, karena kontrak ini berbentuk kerja sama dan bukan utang piutang.

Pada dasarnya *musyarakah* adalah semata-mata akad berbentuk kerja sama dimana kedua belah pihak yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dan anggota disini berdasarkan kepercayaan. Namun jika adanya jaminan tersebut menyebabkan belum adanya kepercayaan kedua belah pihak dalam melaksanakan pembiayaan *musyarakah*. Maka hal tersebut menyebabkan belum terlaksananya dengan penuh dari kontrak

yang dilakukan tersebut. Kesalahan dalam pembebanan jaminan menyebabkan kontrak menjadi batal .

5. Kedudukan kedua belah pihak tidak setara

Salah satu hal terpenting dalam dalam operasional lembaga keuangan syariah yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional adalah prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini mengandung unsur kesetaraan dalam bekerja sama. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan penerapan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani . Dimana pihak anggota harus menyediakan jaminan untuk menanggung suatu kerugian dari suatu usaha yang dilakukan, sehingga seolah-olah dibebankan secara penuh kepada salah satu pihak. Hal ini menyalahi Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, bahwa akad yang dilakukan harus berdasarkan asas *taswiyah* (kesetaraan) dimana beberapa pihak memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.¹⁴

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana hasil dari penelitian yang telah diteliti tersebut dalam pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya atas judul Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak, berikut dapat ditarik kesimpulan, dan saran yaitu:

A. Kesimpulan

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan *musyarakah*, dimana produk tersebut dilaksanakan berdasarkan akad *musyarakah* tergolong jenis *syirkah uqud* (suatu kontrak yang disepakati secara bersama) dan termasuk dalam *syirkah Inan* dimana bentuk modal, bagi hasil maupun kerja tidak sama dalam segi porsinya.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani dalam merealisasikan akad *musyarakah* bila ditinjau dari akad dalam literatur pelaksanaan sudah terpenuhinya *ijab* dan *qabul* akan tetapi pembiayaan akad musyarakah bukan hanya dilihat dari akadnya, namun juga dalam sistem pelaksanaannya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-

MUI/IV/ 2000 tentang aplikasi *musyarakah* dimana dalam penentuan nisbah bagi hasil (keuntungan) yang ditetapkan di awal berupa nominal tetap yang disetorkan anggota kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani yang seharusnya pembagian nisbah bagi hasil (keuntungan) diberikan dalam bentuk proporsi persentase yang diperoleh oleh anggota atas usahanya serta dalam pola kerja seutuhnya dipegang penuh oleh anggota dan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani hanya memantau usaha, padahal dalam pembiayaan ini para pihak harus berbagi porsi kerja, begitu pula dalam pembagian kerugian diperuntuhkan hanya pihak anggota, namun seharusnya dalam pembiayaan *musyarakah* kedua pihak harus membagi kerugian secara proporsional menurut masing-masing modal yang disertakan sehingga menyalahi syarat *mauqud alaih* (objek akad). Selain itu pula timbul permasalahan mengenai angsuran yang dibayar tetap oleh anggota hal ini menyerupai bunga (riba) yang sifatnya *flat* serta diberlakukannya jaminan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan *musyarakah* sehingga menyerupai sistem operasional lembaga keuangan konvensional dan menyebabkan kedudukan kedua belah pihak tidak setara.

B. Saran-Saran

1. Akad pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani sebagai lembaga keuangan syariah non bank alangkah baiknya memperhatikan tentang ketentuan umum yang ada pada lembaga untuk merealisasikan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan umum yang berlandaskan prinsip syariah, khususnya berpatokan dengan aturan yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional MUI tentunya dengan peraturan tentang fatwa *musyarakah* dengan benar.
2. Penggunaan akad pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani harus membenahi mengenai bagi hasil (keuntungan), dimana lebih memperhatikan keuntungan yang berbentuk persentase bukan berdasarkan nominal dari modal yang digunakan anggota, kemudian pula tentang resiko dalam penggunaan pembiayaan *musyarakah* ditanggung secara bersama bukan diperuntuhkan untuk pihak tertentu seperti dalam hal ini adalah anggota.
3. Pengelola dan pengawas sebagai bagian dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani harus bisa memerankan tugas masing-masing serta meningkatkan kinerja untuk dapat merealisasikan suatu lembaga non bank yang mempunyai

reputasi dan kinerja yang baik, khususnya pada produk pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani.

4. Masyarakat (anggota) yang menggunakan produk pembiayaan *musyarakah* seharusnya tidak bersifat pasif terhadap berlangsungnya akad atas bentuk kerja sama. Seharusnya nasabah mengetahui bagaimana seharusnya penggunaan akad *musyarakah* yang sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan penulis selanjutnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kahlani, Muhammad Ismail. 1960. *Subul As-Salam juz 3*. Mesir: Maktabah wa Mathba'ah.
- A.Mas'adi, Ghufon. 2010. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Harsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Amirudin Zaenal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim. 2012. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Vol 5*, Jakarta: Gema Insani.
- Bashith, Abdul. 2008. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press.

Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Riba Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.

Bungin, M. Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djazuli, A dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ghufron A, Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hajar Al Asqalani, Ibnu Al Hafid. 2011. *Bulughul Maram*. Surabaya: Grafis Mutiara Ilmu.

Huda, Nurul. 2010. *LKS Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Khoirin, Nur. 2010. *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*. Semarang: IAIN Walisongo Pres.

Maleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya.

- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press.
- Riyanto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina.
- S, Burhanuddin. 2001. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- SM, Makhalul Ilmi. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Dyah Ochtorina. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usanti, Trisodini P. 2007. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widyaningrum, Nurul. 2002. *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*. Bogor: Akatiga
- Yunus, Jamal Lulain. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Malang Press.

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara

Berikut ini merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak direktur atas nama Noor Muharor SE pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 15 November 2016

Tempat : Kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Pringgodani Demak

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yakni:

1. Pertanyaan:

Apa saja produk yang disediakan KJKS Pringgodani Demak?

Jawaban:

Kami di KJKS Pringgodani Demak menyediakan dua produk yaitu pembiayaan dan simpanan. Produk pembiayaan terdiri dari bai bitsaman ajil, murabahah, musyarakah, qordhul hasan. Sedangkan produk simpanan terdiri dari simpanan amanah, simpanan si suka berjangka, simpanan sukarela, simpanan sisuqur, simpanan siaman, simpanan ZIS, simpanan simabrur.

2. Pertanyaan:

Bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan musyarakah?

Jawaban:

Nasabah yang menginginkan melakukan pembiayaan mendatangi kami di KJKS Pringgodani, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan, dan membawa perlengkapan yang akan dijaminkan sebagai syarat untuk melakukan pembiayaan, setelah daianggap layak kami akan memberikan pembiayaan, kemudian nasabah mengangsur per bulan sesuai dengan kesepakatan kemampuan dari nasabah.

3. Pertanyaan:

Apakah dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah dipersamakan dengan pembiayaan lainnya?

Jawaban:

Dalam pelaksanaanya pembiayaan musyarakah dipersamakan dengan pembiayaan lainnya.

4. Pertanyaan:

Bagaimana perhitungan bagi hasil (keuntungan) yang disetorkan nasabah kepada KJKS Pringgodani?

Jawaban:

Tentunya dalam perhitungan kami tentukan langsung tergantung berapa besarnya yang dipinjam kemudian berapa lama angsuran yang dilakukan, maka kami akan menghitungnya.

5. Pertanyaan:

Apakah ada pengawasan yang dilakukan KJKS Pringgodani terhadap usaha nasabah?

Jawaban:

Tentunya kami hanya mendampingi dalam hal usahanya saja.

Daftar Pertanyaan Anggota

1. Berapa lama anda menjadi nasabah KJKS Pringgodani Demak?
2. Apakah anda melakukan pembiayaan musyarakah di KJKS Pringgodani Demak?
3. Apakah Anda mendapatkan formulir ketika melakukan pembiayaan musyarakah di KJKS Pringgodani?
4. Apakah dalam melakukan pembiayaan musyarakah anda memberikan berupa jaminan?
5. Apakah Anda mengetahui pembiayaan yang anda lakukan pada KJKS Pringgodani Demak?
6. Bagaimana anda mengangsur pembiayaan per bulannya? (berupa nominal tetap atau porsi)
7. Apakah anda mengetahui aturan umum yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan oleh nasabah?

LAMPIRAN



**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
PRINGGODANI**
SYARIAH, AMANAH, MUDAH & BAKUKAH



AKAD PEMBIAYAAN

No.: 010. 0000.

Ar-Rahmeh alla ta'ala wal-ladzi wa'al-lahada amma Muhammadar-rasulullah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nene Maharuz, SE.

Jabatan : Direktur KPS PRINGGODANI

Bertindak untuk atas Nama KPS PRINGGODANI, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I, dan

2. Nama :

Alamat :

Bertindak untuk atas Nama DIDI SUNDRI

3. Nama :

Alamat :

Bertindak sebagai ISTRI / SUAMI dari

Untuk selanjutnya Nama yang tersebut herein dan ketiga disebut sebagai Pihak II (Kedua).

Pihak I dan Pihak II dengan penuh kesadaran dan sanggup menandatangani seluruh realisasi dan isi dari Akad ini telah sepakat untuk mengadakan persetujuan dan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Pihak I sebagai SHAHIDUL MAL telah memberikan pembiayaan kepada Pihak II sebagai MUDHARIB sebesar Rp., terhitung dengan

Akud PEMBIAYAAN MSN/DBA/MKD / ... menandatangani

PASAL 2

Pihak II (MUDHARIB) telah setuju dan sanggup mengembalikan pembiayaan tersebut Pasal 1 kepada Pihak I (SHAHIDUL MAL) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Sistem Pengembalian Angsuran
- 2). Sistem Angsuran : / BULANAN
- 3). Jumlah Angsuran :kali
- 4). Tanggal Jatuh Tempo :
- 5). Ketentuan pengembalian lain tertera pada surat Pembiayaan/Persetujuan & Surat Angsuran yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Akad ini.

PASAL 3

Pihak II (Kedua) setuju untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena akad pembiayaan ini, yang meliputi:

- 1). Biaya Administrasi, sebesar Rp.
- 2). Fee Peng Labahan, sebesar Rp.
- 3). Biaya Material, sebesar Rp.
- 4). Biaya Notaris, sebesar Rp.
- 5). Biaya Asuransi, sebesar Rp.

Jumlah Biaya sebesar Rp.

Yang semua biaya tersebut harus dibayar di muka.

PASAL 4

Pihak II (Kedua) setuju dan sanggup untuk memberikan bagian persetujuan dari hasil usaha yang dibayai kepada Pihak I (Pertama) sebesar Rp. yang akan dibayar secara angsuran setiap bulan.

PASAL 5

Ketika telah Pihak II setuju untuk mengakhiri persetujuannya ini bila Pihak II (Kedua) telah mengembalikan seluruh jumlah Pembiayaan/Persetujuan serta lampiran lainnya kepada Pihak I (Pertama).



**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
PRINGGONDANI**
SYARIAH, AMANAH, MUDAH & BAROKAH



PASAL 6

- 1). Bila Pihak II (Kedua) lalai membayar/memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bernama, maka segala ongkos penagihan dan kuasa Pihak I harus dibayar oleh Pihak II
2). Bila Pihak II (Kedua) lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada pasal (1) dan (4) sesuai dengan jatuh tempornya maka Pihak II bersedia membayar Kifarat Akad.

PASAL 7

Guna menjamin kepastian keamanan Pembayaran/Putang yang diberikan dan untuk menunjukkan kesanggupan dalam berusaha maka Pihak II (Kedua) memberikan Ar-Rahn/Jaminan/Agunan atas Pembayaran/Putang tersebut berupa:

1.
2.
3.

maka ar-Rahn dan seluruh barang, baik barang investasi maupun barang dagangan/barang untuk kegiatan usaha yang dibayai oleh Pihak I (Pertama) adalah tetap menjadi milik Pihak I (Pertama) sampai Pihak II (Kedua) melunasi seluruh kewajibannya kepada Pihak I (Pertama), sehingga bila telah jatuh Tempo dan Pihak II (Kedua) belum dapat melunasi kewajibannya maka Pihak I (Pertama) berhak menjual atau melelang barang atau harta yang dijadikan ar-Rahn untuk melunasi kewajiban Pihak II, yang sisanya akan dikembalikan kepada Pihak II.

PASAL 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I, maka Pihak II bersedia untuk setiap saat bila diperlukan memberikan keterangan kepada Pihak I atas keadaan perusahaan/usahanya, dan memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk setiap saat memeriksa keadaan usaha, barang dan pembukuan usahanya dengan biaya dari pihak II.

PASAL 9

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Akad perjanjian ini, akan diatur dalam surat-surat dan atau kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada serta tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini.

PASAL 10

Kesekuelensi dan segala akibat hukum dari persetujuan Akad ini kedua belah Pihak sepakat memilih domisili Hukum dan berperkaranya di Kantor Pengadilan Negeri DEMAK.
Demikian Persetujuan Akad ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari ini tanggal di DEMAK.

Pihak I
RJS PRINGGONDANI

Pihak II
Nasibah Debitur

ISTRI / SUAMI

Saksi I

Saksi II

Saksi III

KA / ADM / Marketing



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH
PRINGGODANI
SYARIAH, AMANAH, MUDAH & BAKOKAH



Lamp. : 1 (satu) Lember.
Hal : Permohonan Pembiayaan

Kepada Yth.
Pimpinan KJKS (KSPPS) Pringgodani
di _____

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	_____	Agama	:	ISLAM
Tempat/ Tgl. Lahir	:	_____	Pendidikan	:	_____
Alamat	:	_____			
No. Telepon	:	_____			
Jumlah tanggungan	:	_____			
Nama masjid/ Pengajian	:	_____	Pembina/Takmir	:	_____
Pekerjaan	:	_____	Melai Usaha	:	_____
Jenis Usaha	:	_____	Alamat Usaha	:	_____
Jumlah Modal	:	Rp. _____			
Pendapatan kotor	:	Rp. _____			
Pendapatan bersih	:	Rp. _____			
Jumlah Pembiayaan	:	Rp. _____			
Perkiraan keuntungan	:	Rp. _____			
Nisbah bagi hasil KJKS P.	:	Rp. _____			
Perkiraan bagi hasil	:	Rp. _____			
Jumlah Setoran	:	Rp. _____	/Harian/Minggu/Bulan		
			Tabungan Amanah	:	Rp. _____
			Bagi hasil	:	Rp. _____
Waktu Pembayaran	:	_____	Harian/Minggu/Bulan		
Mulai Pembayaran	:	_____	Akhir Pembayaran	:	_____
Jumlah yang disetujui	:	Rp. _____			

Suami/ Istri menyetujui pembiayaan yang diajukan: setuju/tidak

Demikian data-data diatas kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, dan amat kebenaran data yang disertai kesungguhan saya menggunakan data sesuai dengan perjanjian permohonan ini.

Apabila kelak kemudian hari ada keuntungan yang lebih banyak saya bersedia untuk ber INFAQ di KJKS Pringgodani.

Bilakhir taufiq walhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Permohon, _____ Demak, _____ 20 _____
Suami/Istri _____ Penjamin

Marketing _____ Mengetahui,
Kepala Kzs _____ Manager Pembiayaan



**KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH
PRINGGODANI**

SYARIAH, AMANAH, MUDAH & BAROKAH
Jl. Raya Gajah No. 40 Telp. : (0291) 4284450
Badan Hukum Nomor : 112/BH/XIV.8/KDK.11-03/V/2007
Email : ksppspringgodani@yahoo.com



Nomor : 008/KSPPS.P/XII/2016

Lamp. :-

Hal : Keterangan Penelitian

Kepada yth,

Dekan UIN Walisongo Semarang

Fakultas Syariah dan Hukum

di

Tempat

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Segala puji bagi ALLAH pemilik alam semesta, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, istri-istrinya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, para Nabi, utusan dan seluruh malaikat dan pengikut-pengikut Nabi sampai hari kiyamat.

Berkenaan dengan ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang bahwa :

Nama	Ahsani Taqwilah
NIM	122311020
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah melakukan penelitian di KJKS (KSPPS) Pringgodani Gajah Demak, guna untuk memenuhi penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Gajah, 22 Desember 2016
KJKS Pringgodani



PRINGGODANI
GAJAH-DEMOK

H.A. Izzati, SE
Ketua

Noor Muharor, SE
Direktur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahsani Taqwiim
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 3 Juni 1994
Alamat Asal : Perum Wiku II Jl.Flamboyan III blok N.19
RT 06/RW 05

Katonsari Demak

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Jenjang Pendidikan

1. TK Muslimat NU Demak, lulus tahun 2000
2. MI Sultan Fatah Demak, lulus tahun 2006
3. SMP N 1 Demak, lulus tahun 2009
4. SMAN 1 Demak, lulus tahun 2012
5. Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah , Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semarang, 26 Mei
2017
Hormat Saya

Ahsani Taqwiim
122311020